

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberadaan hutan memegang urgensi yang tinggi dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai penyangga keseimbangan lingkungan sekaligus habitat alami bagi beragam jenis flora dan fauna, di samping perannya sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Ekosistem hutan menyimpan kekayaan hayati yang melimpah dan memberikan kontribusi manfaat yang signifikan bagi keberlangsungan makhluk hidup (Melaponty dan Manurung, 2019). Hutan di Indonesia menjadi sebagai salah satu paru-paru dunia karena kemampuannya dalam menyerap gas karbon dioksida yang bersifat berbahaya sekaligus menghasilkan oksigen yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia (Shafitri et al., 2018).

Secara definisi, hutan dapat dipahami sebagai suatu kesatuan ekosistem yang terbentuk dari hamparan lahan dengan dominasi vegetasi pepohonan, di mana antara komponen biotik dan abiotik di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain. Soerianegara dan Indrawan (2005) menegaskan bahwa hutan merupakan ekosistem yang memiliki peran krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Definisi serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 41 Pasal 1 (1999), yang menyatakan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati dengan dominasi pepohonan dalam perpaduan alam lingkungannya, yang antarkomponennya tidak dapat terpisahkan.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga yang menyimpan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang tersimpan dalam hutan dapat menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan juga penyedia oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hutan memberikan manfaat kepada manusia sebagai penunjang kehidupan dengan memanfaatkannya secara langsung atau diolah menjadi bahan baku industri (Farhan *et al.*, 2019). Kondisi dan keberadaan vegetasi menjadi salah satu sumber data dan informasi penting dalam pengembangan pengelolaan hutan

(Chairul, 2023). Pengelolaan hutan agar tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengubah secara signifikan fungsi hutan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat sekitar. Salah satu bentuk atau langkah yang dapat dilakukan untuk pengelolaan ini adalah dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Dwiprabowo *et al.*, 2013).

Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang termasuk dalam program Perhutanan Sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui skema ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan legalitas akses kepada masyarakat untuk turut mengelola kawasan hutan negara. Pengelolaan HKm ini pada mulanya diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007, yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2010. Ketiga regulasi tersebut secara berjenjang mengatur berbagai ketentuan teknis dan administratif terkait pelaksanaan pengelolaan HKm (Asgar & Bonita *et al.*, 2019). Hutan Kemasyarakatan merupakan skema pengelolaan hutan negara dengan memberi akses legal dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan secara optimal dan adil (Dephut, 2007). Dengan adanya skema hutan kemasyarakatan, dapat mengurangi resiko pembalakan hutan secara liar dan berlebihan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi masyarakat (Asgar & Bonita *et al.*, 2019).

Secara umum, vegetasi di setiap kawasan hutan berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor iklim, status kawasan hutan, dan aktivitas manusia dalam kegiatan memenuhi kebutuhan hidup (Handayani *et al.*, 2022). Vegetasi merupakan kumpulan tumbuhan-tumbuhan berbeda jenis yang hidup berdampingan pada suatu kawasan dan memiliki interaksi antar komponennya (Ufiza *et al.*, 2018). Vegetasi di hutan dikelompokkan berdasarkan tahap perkembangannya menjadi tingkat pohon, sapling, dan seedling. Vegetasi tingkat pohon dicirikan dengan pohon dengan diameter batang (DBH) diatas 10 cm dan tinggi rata-rata diatas 10 meter. Vegetasi tingkat sapling dicirikan dengan pohon yang memiliki diameter bantang 2-10 cm dan tinggi sekitar 1-7 meter. Sedangkan vegetasi tingkat seedling yang merujuk pada tumbuhan yang baru tumbuh dengan

tinggi di bawah 1 meter dan diameter batang kurang dari 2 cm (Dewita *et al.*, 2020).

Salah satu tingkatan vegetasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan hutan adalah tingkat sapling. Vegetasi tingkat sapling merupakan fase permudaan dari tegakan hutan yang memiliki peran dalam penentuan penampakan dan kelestarian hutan dimasa mendatang (Nursal *et al.*, 2012). Nursal *et al* (2012) juga mengemukakan bahwa sapling akan menjadi tingkat vegetasi yang berperan dalam regenerasi hutan. Sapling akan menggantikan pohon-pohon penyusun hutan yang telah mati.

Pada tahun 2025, penelitian mengenai analisis vegetasi tingkat sapling dilakukan pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan Padang Janiah, Padang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 23 famili tingkat sapling yang ditemukan. Dari 23 famili sapling tersebut, didapatkan bahwa famili Melastomaceae merupakan famili dominan dengan persentase 30.21% dan famili Euphorbiaceae merupakan famili co-dominan dengan persentase 16.67%. Penelitian ini juga menemukan bahwa jenis sapling yang mendominasi dalam kawasan ini adalah *Bellucia pentamera* dari famili Melastomaceae yang dipengaruhi kepadatan relatif dan dominansi relatif. Hal ini menandakan *Bellucia pentamera* memiliki jumlah individu tinggi dibandingkan jenis lainnya. Tingkat keanekaragaman sapling di kawasan ini dikategorikan sedang (Ahadi & Chairul , 2025).

Penelitian lain terkait analisis vegetasi pada tingkat sapling juga dilaksanakan pada Kawasan Geopark Silokek, Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023. Hasil dari penelitian tersebut mencatat keberadaan 31 spesies yang tergolong dalam 28 genus dan 14 famili, dengan total 48 individu yang teridentifikasi. Adapun famili co-dominan pada tingkat sapling tersebut meliputi Euphorbiaceae, Annonaceae, Leguminosae, dan Sapindaceae. Pada penelitian ini, dikemukakan bahwa spesies dengan nilai INP 27.94% yaitu *Archidendron bubalinum* dan spesies dengan INP terendah adalah *Sandoricum koetjape* dan dengan nilai 9.88%. Keanekaragaman di kawasan ini mencapai nilai 3.28 yang menunjukkan tingkat keanekaragaman yang tinggi (Geovana & Chairul, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, serta mempertimbangkan belum tersedianya kajian mengenai vegetasi tingkat sapling pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, maka penelitian dengan judul "Analisis Vegetasi Tingkat Sapling di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang" perlu untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komposisi serta struktur vegetasi tingkat sapling pada kawasan hutan tersebut.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana komposisi sapling di kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang?
2. Bagaimana struktur sapling di kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang?
3. Bagaimana keanekaragaman sapling di kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komposisi sapling di kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang.
2. Untuk mengetahui struktur Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang.
3. Untuk mengetahui keanekaragaman sapling di kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi terkait komposisi, struktur, serta keanekaragaman vegetasi tingkat sapling di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan spesies tumbuhan yang terdapat di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang.